

Strategi Jepang dalam Menghadapi Ancaman Uji Coba Rudal Korea Utara Melalui

J-Alert

Fitria Puspitasari

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ilmu Hubungan Internasional, Yogyakarta,

Indonesia

Fpuspita698@gmail.com

Abstract

This paper is intended to acknowledge the Japanese effort of against nuclear test by North Korea and Japanese government's action on civil protection which considered threats to Japan security and regional security. The method used in the writing of this writing uses a qualitative method which is using secondary data analysis which uses data that are non-numbering, this data can be in the form of books, journals, reports, newspaper, magazines, website, treaty agreement, that relevant to this writing. This writing is focus on the effort of Japanese Government on handle the threat of nuclear test by Korean Utara to protect the civilization without violating the rules that binds Japan. Nuclear test by Korea Utara become a concern for the world, also become serious threat for regional era especially for Japan. With the strategy that taken by Japan, Japanese Government used a defense strategy in the form of J-Alert system. This system will response if there are a missile launch that likely to pass through the Japanese area as an early warning system.

Keywords: Japan, Nuclear test, North Korea, Early Warning

Pendahuluan

Keamanan suatu negara yang meliputi keamanan human sources, keamanan ekonomi, keamanan politik, keamanan social, keamanan sumber daya alam dan semua elemen lainnya juga merupakan tugas dari negara itu sendiri untuk menjaga kestabilitasnya, yang artinya bahwa negara menjadi aktor yang berperan penting disini. Dilain sisi, *United Nations Development Program (UNDP)* dalam *Human Development Report* 1994 merupakan badan bentukan PBB yang pertama memperkenalkan konsep human security yang tentunya berbeda dengan national security (Ramadhan, 2011). Peningkatan keamanan yang dianggap mengancam ini bisa kita lihat di wilayah asia timur. Jepang sebagai negara pemimpin di asia timur dalam Buku Putih Pertahanan Jepang memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan dan peningkatan kekuatan militer di Asia Timur seperti Tiongkok dan Korea Utara yang disebut-sebut sebagai ancaman.

Jepang merupakan salah satu negara adi daya dimana pada zaman dahulu Jepang berkuasa dan menjajah beberapa negara termasuk kawasan Asia Timur. Jepang bahkan disebut-sebut sebagai negara penjajah yang mengerikan, dan bahkan menimbulkan trauma yang dalam salah satunya negara China. Sejak lama Jepang dan Korea Utara memiliki hubungan yang kurang harmonis karena latar belakang sejarah di masa lalu. Sebelumnya, Jepang pernah memiliki hak kuasa atas administratif urusan dalam negeri dan luar negeri semenanjung Korea. Namun, hal itu telah berubah semenjak kekalahan Jepang pada Perang Dunia II kepada Amerika Serikat pada 15 Agustus 1945. Kemudian jepang menandatangani perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat pada September 1951 sebagai awalan terbentuknya aliansi dalam urusan militer yang menjadikan Jepang

menyerahkan urusan keamanan nasionalnya kepada Amerika Serikat dalam rangka mempertahankan keamanan wilayahnya dari serangan luar.

Bahkan dalam perjanjian Fransisco atas kekalahan Jepang pasca Perang Dunia ke-dua membatasi kegiatan kemiliteran Jepang, maka dalam urusan pertahanan negaranya sebagian besar di ambil alih oleh pasukan pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Jepang. Hal ini dilakukan dibawah konstitusi Jepang pasca perang yang dirancang oleh Amerika Serikat sendiri dan resmi di ratifikasi pada tahun 1947 pada artikel 9 yang berisi pelarangan pengembangan kekuatan militer atas Jepang (Juwana, 1993). Tentu saja hal ini menjadi *struggle* untuk Jepang sendiri mengingat saat ini negara-negara di wilayah Asia Timur sedang gencar-gencarnya mengembangkan kekuatan militer. Oleh karena itu, meskipun Jepang ada di dalam payung keamanan Amerika Serikat, tetapi ancaman dari negara lain masih terbuka salah satunya datang dari Korea Utara yang sedang gencar mengembangkan senjata nuklir.

Jepang yang secara geografis berdekatan dengan Korea Utara cukup was-was dengan pembangunan kapabilitas militer berupa uji coba nuklir yang dilakukan. Hal ini sebabkan karena Jepang merupakan satu-satunya negara yang pernah merasakan bagaimana kengerian bom atom jika diluncurkan. Oleh karena itu, Jepang tentu saja merasa bahwa pembangunan militer seperti misil balistik dan nuklir dikawasan adalah sebuah ancaman yang serius. Korea Utara sekarang menjadi sorotan oleh dunia internasional atas pengembangan senjata nuklir. Korea Utara sering melakukan aktivitas uji coba rudal ke laut lepas yang secara langsung melewati wilayah konstitusi Jepang secara geografis. Peluncuran yang dilakukan direspon oleh Shinzo Abe sebagai suatu ancaman yang serius yang belum pernah terjadi sebelumnya (BBC, 2017). Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat telah berkoordinasi untuk menanggapi percobaan senjata

nuklir Korea Utara pada 2016, gempa di sekitar Kumamoto Jepang pada bulan April 2016, dan peristiwa lainnya yang mempengaruhi keamanan regional Asia Timur (Congressional Research Service, 2017).

Dalam sistem pertahanan udara (*Air Defense*) sistem rudal merupakan unsur yang sangat penting untuk dimiliki. Sistem pertahanan udara (*Air Defense*) adalah suatu tatanana dalam kerangka pertahanan keamanan negara dengan melibatkan seluruh pertahanan udara yang diwujudkan dalam sebuah upaya dan tindakan terpadu secara terus menerus baik secara operasional maupun pembinaan untuk menanggulangi setiap ancaman yang datang dari udara (Priyono, 2011). Namun disini, Jepang yang di cap sebagai negara pencinta damai tidak diperkenankan melakukan perlawanan dengan mengembangkan sistem pertahanan udara yang menunjang seperti pembuatan peluru kendali atau perlawanan melalui pasukan serdadu militernya.

Desakan yang diajukan oleh Dewan Keamanan PBB tidak lantas membuat Korea Utara gentar, justru uji coba masih terus berlanjut. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat Jepang merasa khawatir bahkan trauma atas rudal yang bisa kapan saja lewat. Peluncuran rudal yang dilakukan menimbulkan adanya suara dentuman yang cukup keras dan getaran seperti gempa, hal ini menjadikan warga Jepang khususnya Hokaido merasa trauma. Kekhawatiran masyarakat tentu saja mendorong Pemerintah Jepang untuk lebih waspada dan harus berusaha untuk menangani trauma warganya dan memikirkan dampak yang lebih serius dari ancaman rudal Korea Utara kedepannya (Tempo, 2018). Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Jepang dan Departemen Pertahanan Jepang bisa menanggulangi masalah ini.

Jepang sebagai negara maju tentu saja tidak kehabisan akal dalam membuat inovasi baru. Kecanggihan teknologi yang dimiliki Jepang kemudian membuat Jepang

mencanangkan teknologi berupa J-Alert sebagai sebuah jaringan informasi buatan pemerintah Jepang (*Cabinet Secretariat Civil Protection Law*). Sistem ini telah diaktifkan di berbagai distrik di Jepang seperti Hokkaido, Miyagi, Akita dan distrik lainnya. Semangat Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklirnya dan respon Jepang terhadap nuklir Korea Utara serta kebijakan Jepang dalam menangani ancaman dari Korea utara ini juga nantinya akan menarik untuk dikasi dalam tulisan ini.

Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana Strategi Jepang J-Alert dalam menghadapi ancaman peluncuran uji coba rudal oleh Korea Utara?

Kerangka Konseptual

Strategy atau istilah lainnya yang lebih populer *grand strategy* merupakan konsep yang ada dalam hubungan internasional. Dalam bukunya, Colin Dueck menyebutkan bahwa *grand strategy* melibatkan kesadaran negara dalam memprioritaskan tujuan atau kepentingan akhir dari kebijakan luar negeri, identifikasi sumber daya potensial yang dimiliki, serta pemilihan rencana dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya tersebut (Dueck C. , 2004). Konsep *Strategy* ini sering kali digunakan oleh negara untuk mencapai suatu tujuan negara dalam rangka menghadapi ancaman seperti hal melindungi masyarakat sipil. Ancaman-ancaman yang diterima oleh masyarakat biasanya dititikberatkan kepada negara yang berperan sebagai aktor utama yang harus melindungi masyarakatnya. Ancaman yang datang dapat berupa ancaman militer dan non-militer. Hal ini berkesinambungan dengan

apa yang dialami oleh warga Jepang, dimana saat ini Jepang sedang menghadapi ancaman berupa penembakan rudal balistik oleh Korea Utara menuju laut lepas yang secara geografis melewati kawasan konstitusi Jepang. Dalam rangka menghadapi ancaman tersebut, maka Jepang harus berhati-hati dan teliti dalam memilih strategi yang tepat untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman tersebut.

Meskipun Jepang saat ini masih berada dalam payung pertahanan Amerika Serikat dalam urusan militernya, Jepang belum sepenuhnya merasa aman, oleh karena itu Jepang berusaha berfikir dua kali untuk memperkuat pertahanan negaranya dalam rangka menghadai ancaman rudal Korea Utara. Menimbang situasi dari sudut pandang ini pemerintah nasional Jepang secara inheren berkewajiban untuk memastikan perdamaian dan menjaga keselamatan masyarakatnya dari serangan luar (*Armed Attack Situation Response Law*). Pada juni 2004, Undang-undang tentang tindakan untuk Perlindungan Rakyat dalam situasi penyerangan bersenjata, dll (*Civil Protection Law*) diberlakukan untuk membuat seluruh bangsa sepenuhnya siap menghadapi situasi ini dengan melakukan tindakan yang tepat dan segera melindungi diri dari ancaman. Selanjutnya, Jepang memanfaatkan adanya teknologi pendeteksi radar ini yakni MIDAS dan BMEWS untuk dijadikan sebagai pertahanan berupa sistem peringatan dini tentang peluncuran rudal balistik milik Korea Utara yang melewati Jepang. Kemudian, muncullah terobosan teknologi yang menunjang pertahanan udara yang bernama J-Alert yang dicanangkan oleh *Secretariat Cabinet Civil Protection Portal Site* milik Jepang. Sistem J-Alert ini dibentuk untuk memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat Jepang yang di wilayahnya telah terpasang alarm ini untuk mendengarkan atau mengikuti instruksi yang diberikan oleh alat ini.

Dalam kaitannya dengan teori *Strategy*, Pemerintah Jepang menjadi aktor yang berperan sebagai penentu kebijakan mengenai bagaimana cara untuk mencapai tujuannya. Disini pemerintah Jepang akhirnya membuat sebuah strategi dengan menilik fungsi dari adanya *Early Warning defense System* sebagai alat atau sarana yang dapat digunakan untuk memberitahukan mengenai info yang harus diketahui oleh masyarakatnya, khususnya mengenai ancaman. Alasan mengapa Jepang menggunakan dan mengembangkan teknologi ini adalah karena J-Alert ini dianggap sebagai alat yang efektif dalam menunjang sistem pertahanan Jepang dan secara tidak langsung ini juga tidak melanggar konstitusi yang mengikat Jepang.

Pembahasan

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II membuat kebijakan pertahanan nasional Jepang didasarkan pada Perjanjian 1960 mengenai Kerjasama dan Keamanan dengan Amerika Serikat dimana keamanan Jepang dipegang oleh dua pihak yakni untuk keamanan internal dipegang oleh Jepang, sedangkan keamanan nasional yang kemungkinan mendapatkan serangan dari pihak luar dibantu oleh pasukan militer Amerika Serikat. Perjanjian penyerahan diri atas kekalahan Jepang pada sekutu dalam perang tertulis dalam *postdam declaration* (26 Juli 1945). Aliansi keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat tertulis dalam The US-Japan Treaty Mutual Cooperation and Security yang diratifikasi pada tahun 1951 dan berlaku sejak April 1952. Oleh karenanya, Jepang menerima kenyataan bahwa kekuatan militer yang dibanggakan dulu harus dilucuti oleh pasukan sekutu yang sebagian besar terdiri dari tentara-tentara Amerika Serikat. Jepang harus tunduk kepada sistem Amerika Serikat dan juga harus mengakui Jenderal Angkatan Laut Amerika Serikat Douglas Mac Arthur sebagai komandan tertinggi kekuatan sekutu Pasifik (Jones, 1992).

Dalam dunia internasional Jepang juga ikut terlibat dalam penataan keamanan internasional walaupun keterlibatan menyeluruhnya diwakili oleh Amerika Serikat. Sejauh ini keterlibatan Jepang secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan yang menekankan pendekatan-pendekatan kepentingan dalam sektor ekonomi. Jepang menggunakan kekuatannya sebagai alat untuk menjalin adanya hubungan ataupun kerjasama dengan negara-negara lain dengan memberikan bantuan ekonomi.

Aliansi yang terjalin antara Jepang dan Amerika Serikat sejatinya memang menimbulkan adanya pro dan kontra. Walaupun terdapat perdebatan, namun Jepang masih berkomitmen untuk melanjutkan aliansi keamanannya dengan pihak Amerika

Serikat. Hal ini dapat dilihat dari perpanjangan aliansi keamanan yang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2013, dimana perpanjangan aliansi ini membahas tentang partisipasi Jepang dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan dunia internasional. Perdana Menteri Itsunori Onodera yang menjabat pada saat itu beserta Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel mengadakan pertemuan pada 3 Oktober 2013. Kedua negara juga sepakat untuk bekerja sama untuk membangun aliansi yang dapat membangun dan meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional (Ministry of Defense, 2014).

Perpanjangan aliansi Jepang-Amerika Serikat yang baru ini disertai dengan adanya modernisasi kemampuan yang lebih menunjang dari Amerika Serikat sebagai mitra aliansi Jepang guna menjaga keamanan nasional Jepang dan mendukung Jepang memenuhi perannya sebagai pemelihara keamanan regional. Kesepakatan-kesepakatan diatas dalam perpanjangan aliansi juga dianggap menguntungkan bagi Jepang oleh karenanya Jepang antusias untuk memperpanjang aliansi keamanan dengan Amerika Serikat.

Sistem keamanan setiap negara kian berubah dan meningkat seiring dengan perubahan sistem internasional yang terjadi. Hal itu sejalan dengan munculnya ancaman atau gangguan-gangguan yang ada mengharuskan negara melakukan upaya untuk menciptakan keamanan wilayah kelautannya berupa wilayah teritorialnya maupun wilayah lautan lepas demi kepentingan negara maupun kepentingan dunia internasional. Wilayah kelautan saat ini menjadi perhatian besar bagi negara khususnya di wilayah samudera Pasifik yang sebagian besar melakukan kegiatan perekonomian disini.

Asia Timur merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya yang melimpah dan menguntungkan bagi sektor perekonomian negara di kawasan. Selain

potensi ekonomi yang kaya dan sebagai tempat jalur perdagangan yang menguntungkan, negara di wilayah Asia Timur memiliki dinamika hubungan yang kompleks dalam hubungan antar negara didalamnya. Kekuatan yang besar yang dimiliki oleh negara anggota ini yang kemudian memancing berbagai potensi konflik. Salah satu contohnya adalah Jepang sebagai negara pemimpin di Asia Timur yang memiliki kecanggihan teknologi, China sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia dengan perkembangan ekonominya yang pesat dan juga Korea Utara dengan potensi nuklir yang dianggap dapat mengancam kawasan. Dibalik keuntungan yang ada, kawasan Asia Timur ini memiliki potensi konflik diantara negara didalamnya, seperti muncul adanya sengketa wilayah territorial, ancaman terhadap keamanan nasional dan kecurigaan terhadap negara tetangga yang memicu peningkatan kapabilitas militer negara.

Korea Utara sebagai negara yang agresif dalam urusan militer membuat Korea Utara memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan negara-negara di Asia Timur khususnya negara tetangga seperti Jepang. Diangkatnya Kim Jong Un menjadi pemimpin Korea Utara membawa ketegangan yang cukup serius dikarenakan Kim Jong Un secara terang-terangan menunjukkan gigi taringnya atas kebijakan militernya yang agresif. Negara-negara di Asia Timur merubah kebijakannya dalam bidang militer mejadi *defensive* dalam rangka merespon tindakan Korea Utara.

Pada tahun 2006 Korea Utara secara resmi menarik diri dari rezim *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) yang membuat Korea Utara secara terang-terangan melakukan uji coba nuklirnya. Kim Jong Un yang diangkat menjadi presiden Korea Utara karena meninggalnya Kim Jong Il pada tahun 2011 pernah diragukan kepemimpinannya karena dirasa belum siap untuk memimpin Korea Utara. Oleh karena

itu, Sebelum duduk di kursi parlemen Kim Jong Un memfokuskan dirinya sebagai jenderal tertinggi angkatan senjata terlebih dahulu untuk menguasai control militer. Maksud dari tujuan Kim Jong Un disini adalah agar ia dapat mewarisi alat control terpenting negara dan juga berlakunya kebijakan “*military first*” milik Kim Jong Il (Choe, 2011).

Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir secara besar-besaran dan hal tersebut dilakukan secara intensif. Tindakan Korea Utara atas uji cobanya mendapatkan sorotan dari dunia internasional ditambah dengan pengkaliman kepemilikan senjata nuklir dan bom hidrogen. Pengembangan senjata nuklir ini membuat Jepang yang notabene merupakan negara tetangga merasa terancam karena beberapa kali uji coba rudal yang dilakukan oleh Korea Utara dapat menjangkau wilayah Jepang. Salah satu rudal yang menjangkau Jepang adalah uji coba yang dilakukan pada tanggal 7 Februari 2016 lalu yang melewati wilayah Okinawa bagian selatan. Hal tersebut tentu saja mendapatkan kecaman dari pihak lain karena hal tersebut melanggar sanksi yang diberikan kepada Korea Utara oleh PBB yang melarang Korea Utara untuk tidak menggunakan senjata berbau nuklir. Namun, Korea Utara mengklaim hal tersebut merupakan sebuah uji coba peluncuran satelit untuk memantau bumi (Cnn Indonesia, 2016). Perdana Menteri Shinzo Abe secara tegas mengatakan bahwa peluncuran roket tersebut tidak bisa diterima oleh Jepang, karena hal tersebut cukup membuat warga Jepang trauma.

Pemerintah Jepang juga memikirkan tentang dampak yang akan diterima oleh Jepang akibat uji coba nuklir oleh Korea Utara. Seperti kasus peluncuran rudal yang menyebabkan adanya guncangan bermagnitudo sekitar 6 sr di wilayah Korea Uatar merupakan dampak dari uji coba nuklir. Untuk melihat lebih jauh, Jepang mengirimkan tiga buah pesawat jet militer untuk memeriksa dampak radiasi (Kompas.com, 2017).

Menindaklanjuti lebih jauh atas keputusan Korea Utara yang mengatakan akan menanggukhan uji coba nuklirnya ditanggapi dengan rasa tidak puas oleh Jepang. Ini dilakukan oleh Pemerintah Jepang karena menganggap bahwa penanggukan yang dilakukan belum sepenuhnya, yang artinya Korea Utara tidak meninggalkan rudal balistik jarak pendek dan jarak menengah yang sekiranya dapat mengancam keamanan Jepang (Christiastuti, 2018).

Uji coba nuklir dan peluncuran rudal oleh Korea Utara tentu menarik perhatian masyarakat Jepang dan cenderung mengalami trauma. Trauma disini dimaksudkan bahwa Jepang menjadi satu-satunya negara yang pernah hancur oleh senjata nuklir. Kebanyakan dari masyarakat Jepang yang wilayah teritorialnya pernah dilewati oleh rudal Korea Utara dilanda ketakutan yang luar biasa. Seperti halnya wilayah pulau Hokkaido yang berada di jalur peluncuran nuklir Korea Utara (Reza, 2017).

Kekhawatiran lain yang dirasakan oleh masyarakat Jepang adalah adanya pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di pulau Okinawa Jepang. Keberadaan pangkalan militer ini dirasa sangat dekat dengan masyarakat Jepang karena berjarak hanya beberapa meter dari rumah warga. Ketakutan mereka adalah bahwa kemungkinan suatu hari nanti akan terkena dampak serangan misil secara langsung (Hasan, 2017). Ketakutan ini terus berlanjut dengan semakin tegangnya hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan dan juga ketegangan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat. Terdapat dua hal yang ditakutkan oleh masyarakat Jepang yakni ketakutan mengenai rudal Korea Utara sanggup mencapai Jepang dan ketakutan atas lokasi pangkalan militer Amerika Serikat yang tak jauh dari rumah warga.

Untuk merespon keluhan dan kekhawatiran yang datang dari masyarakat, Pemerintah Jepang akhirnya mau tidak mau harus mengambil keputusan dengan membuat sebuah

strategi. Seperti yang telah Christopher Layne sebutkan sebelumnya bahwa setiap negara memiliki strategi yang berbeda, setiap strategi yang akan diambil akan melalui proses utama yakni:

1. Penentuan keamanan yang vital bagi negara. Dalam proses ini Pemerintah Jepang sebagai negara yang di cap pecinta damai dan pasif dalam aktivitas kemiliteran tetap berusaha untuk mempertahankan keamanan negaranya dengan mengembangkan kekuatan pertahanan militernya selain mendapat perlindungan payung militer Amerika Serikat.
2. Identifikasi ancaman-ancaman terhadap kepentingan negara. Disini, Pemerintah Jepang telah mengidentifikasi ancaman yang mengancam negara yakni adanya ancaman uji coba nuklir oleh Korea Utara yang dilakukan secara terus menerus dan melewati wilayah konstitusi Jepang. setelah identifikasi tersebut, Jepang kemudian memperhatikan kepentingan negara dalam melindungi keamanan nasionalnya dalam hal melindungi masyarakatnya dari ancaman tersebut.
3. Penentuan cara terbaik untuk mengarahkan sumber daya secara politik, militer, ekonomi dan lainnya yang dapat melindungi kepentingan yang dituju. Pemerintah Jepang memanfaatkan sumber daya militer, ekonomi, dan teknologi yang mumpuni milik Jepang untuk menyokong fungsi militer dalam melindungi masyarakat sipil dari bahaya uji coba nuklir dengan melakukan evakuasi dini.

Pada Juni 2004, Jepang memberlakukan Undang-undang tentang tindakan untuk Perlindungan Rakyat dalam situasi penyerangan bersenjata, dan lainnya (*Civil Protection Law*) untuk membuat seluruh elemen sepenuhnya siap menghadapi bahaya yang kemungkinan mengancam dengan melakukan tindakan yang tepat dan upaya untuk perlindungan diri. Selanjutnya, Pemerintah Jepang memanfaatkan adanya teknologi

pendeteksi radar dan inframerah untuk dijadikan sebagai alat pendukung pertahanan berupa sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini ini kemudian diharapkan oleh Pemerintah Jepang dapat membantu Pemerintah untuk melakukan himbauan mengenai peluncuran rudal balistik milik Korea Utara yang sewaktu-waktu melewati wilayah Jepang. Kemudian, muncullah teknologi terobosan yang dapat menunjang pertahanan udara yang bernama J-Alert yang dicanangkan langsung oleh *Secretariat Cabinet CivilProtection Portal Site* milik Jepang.

J-Alert sederhananya merupakan sistem informasi peringatan dini nasional (*Secretariat Cabinet or Meteorological Agency*) yang berbasis satelit di Jepang, didipasang di pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi dalam waktu singkat melalui satelit buatan. J-Alert dipasang sebagai radio penanggulangan bencana untuk mengirimkan informasi dalam sekejap kepada warga masing-masing distrik dengan melakukan kerjasama dengan sarana transmisi informasi (*broadcast system*) dan sejenisnya dengan meletakkan alat ini di berbagai tempat (Ministry of Internal Affairs and Communications, 2014). Melalui demonstrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2007, sistem ini pada umumnya hanya memerlukan waktu seperkian detik sampai dengan dua puluh detik untuk memulai penyiaran dari alat transmisi informasi negara.

● **National Instantaneous Warning System (J-Alert)**

Ballistic missile information, emergency earthquake bulletins, tsunami warnings, etc. information on events that have no time to deal with. Emergency bulletin e-mail delivered to mobile phones and so on, municipal disaster prevention administrative radio, etc. instantaneously from the country to the residents.

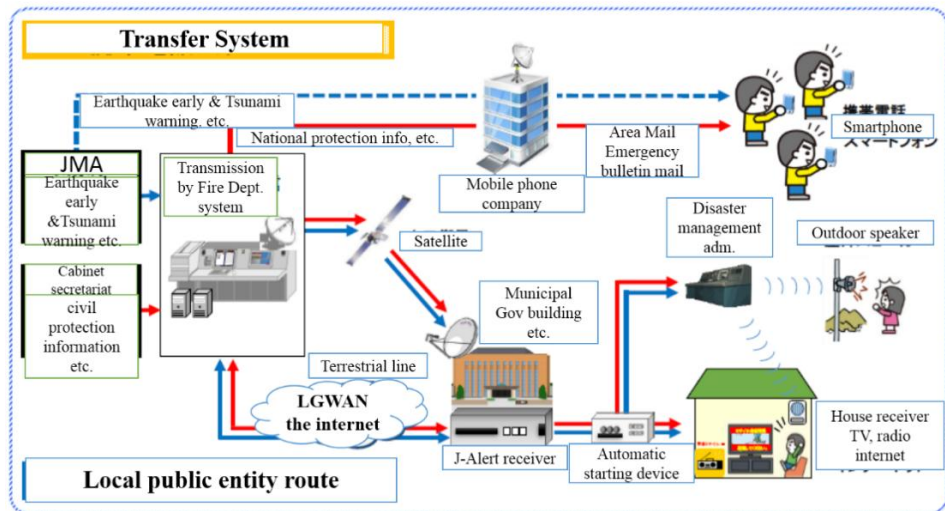


Figure 4. 1 Peringatan dini J-Alert

Sumber : Fire and Disaster Management Agency, dapat diakses pada:

www.fdma.go.jp/html/intro/.../pdf/.../J-ALERT_gaiyou_h28.pdf

Diharapkan bahwa Pemerintah Jepang dengan optimal dapat memanfaatkan perangkat peringatan dini (J-Alert) ini dibuat untuk mempercepat waktu evakuasi dan membantu mengkoordinasikan tanggap darurat. Dalam kasusnya, J-Alert ini tidak hanya menyampaikan informasi melalui siaran radio berupa alat pengeras suara di luar ruangan, namun juga melalui media digital seperti telpon seluler. Yang berarti bahwa sistem J-Alert ini membutuhkan adanya koneksi internet atau wi-fi untuk dapat mencapai para pengguna telpon seluler (Secreatariat Cabinet, 2012).

Secara umum sistem J-Alert memiliki tujuan untuk:

1. Menyebarkan informasi tentang bencana kepada masyarakat Jepang, informasi disampaikan melalui pengeras suara terutama dalam kasus gempa bumi dan peluncuran rudal.

2. Memberikan informasi yang diterima oleh J-Alert dalam bentuk instruksi untuk evakuasi atau saran dari pemerintah daerah, peringatan bencana alam dan laporan mengenai radiasi setelah adanya uji coba nuklir, serta kondisi lingkungan dan sistem transportasi.
3. Memberikan informasi kepada publik mengenai tempat penampungan yang terdekat dan informasi evakuasi lainnya setelah terjadi bencana (Centre of Public, 2016).

J-Alert mengirimkan pesan dengan cara berikut:

- Ketika ada informasi mengenai misil balistik Korea Utara diluncurkan, maka terdapat tiga langkah yang harus dilakukan:

1. Jika kemungkinan rudal jatuh di darat atau wilayah perairan Jepang

- a. Informasi peluncuran rudal/instruksi untuk berlindung.

Bentuk informasi:

“Peluncuran Rudal. Korea Utara tampaknya telah meluncurkan rudal. Berlindung di bangunan kokoh atau bawah tanah.”

Pertama, pemerintah Jepang menginformasikan mengenai peluncuran rudal dan menginstruksikan untuk mencari tempat berlindung. Ketika berada diluar rumah, maka diinstruksikan untuk berlindung di gedung yang kokoh atau bawah tanah seperti perbelanjaan terdekat atau stasiun kereta bawah tanah. Ketika berada di dalam ruangan, maka diinstruksikan untuk berlindung pada bangunan kokoh dan menjauh dari jendela.

- b. Instruksi untuk segera berlindung.

Bentuk instruksi:

“Evakuasi segera. Segera mengungsi. Segera berlindung di bangunan atau di bawah tanah. Sebuah rudal mungkin akan jatuh di daerah sekitar XX prefektur sekitar XX. Segera berlindung.”

Ketika menyadari kemungkinan rudal akan jatuh di darat atau wilayah perairan Jepang, warga diperintahkan untuk segera berlindung. Ketika di luar ruangan diinstruksikan untuk berlindung di sebuah bangunan atau bawah tanah yang dapat memberi perlindungan. ketika berada di dalam ruangan, diinstruksikan untuk menjauh dari jendela atau berlindung di ruangan tanpa jendela.

- c. Informasi tentang zona yang terkena dampak, dll (jika jatuh di wilayah darat atau perairan Jepang)

Bentuk instruksi:

“Dampak missile. Dampak rudal. Sebuah rudal mungkin telah mendarat di daerah sekitar XX kota XX Prefektur sekitar XX. Tunggu informasi lebih lanjut dan tidak meninggalkan tempat perlindungan/penampungan”

Jika rudal kemungkinan telah jatuh di darat atau wilayah perairan Jepang, informasi tentang zona yang terkena dampak, dll akan dikirimkan dan seruan untuk tidak meninggalkan tempat penampungan.

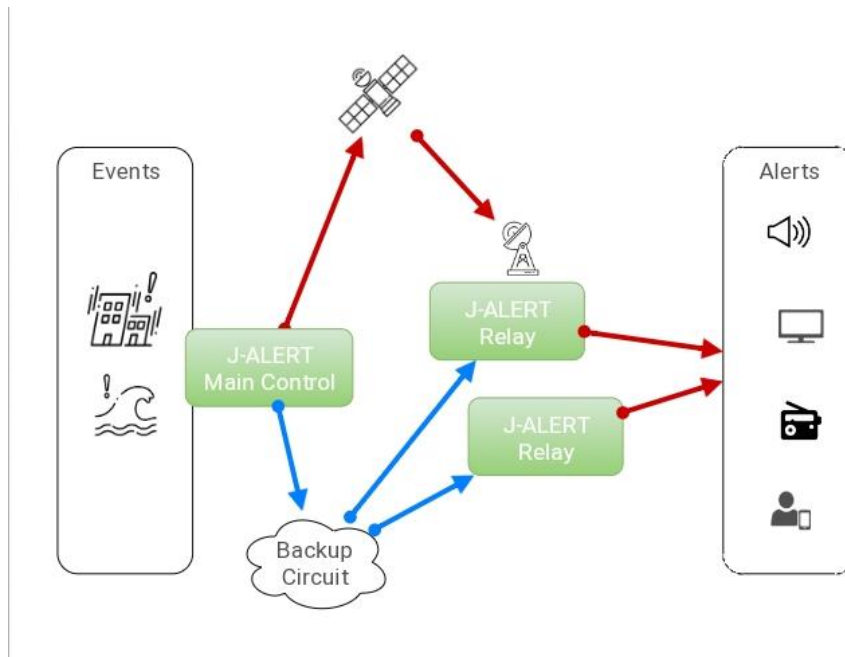


Figure 2 Tinjauan tentang sistem J-Alert

Berdasarkan pada gambar diatas, secara sederhana J-Alert pada dasarnya bekerja seperti hal berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (FDMA) dan Cabinet Secretariat Office milik Jepang, memberikan informasi mengenai situasi darurat seperti peluncuran rudal, tsunami, dan gempa bumi.
2. Cabinet Secretariat Office mengirimkan informasi darurat ke media penerima J-Alert melalui satelit dan sirkuit cadangan.
3. Pemancar J-Alert menerima informasi dan menyampaikannya kepada publik dalam bentuk:
 - Pengumuman dari pengeras suara/sirine yang dipasang di menara dan di gedung.
 - Peringatan melalui media televise dan radio
 - Peringatan melalui ponsel.

Kesimpulan

Jepang merupakan negara pemimpin Asia Timur yang menaruh perhatian khusus terhadap dinamika keamanan di kawasan. Sejak terikat konstitusi pada tahun 1992, Jepang menyerahkan urusan militernya kepada Pangkalan Militer Amerika Serikat. Payung Militer AS ini dianggap tidak cukup efektif untuk mengatasi kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakatnya atas ancaman regional khususnya dari Korea Utara. Korea Utara yang secara terang-terangan melakukan uji coba nuklir cukup menggemparkan dunia internasional dan diwaspadai sebagai sebuah ancaman bagi kawasan. Jepang yang terikat konstitusi sebagai negara pecinta damai dan dilarang melakukan pengembangan militer nasionalnya cukup dilematis menghadapi ancaman dari Korea Utara ini.

Menyikapi ancaman yang datang dari Korea Utara, Jepang dengan menggunakan konsep *Strategy*, menetapkan strategi yang tepat dan efektif untuk mengatasi ancaman dari Korea Utara tanpa melanggar konstitusi. Berangkat dari konsep *Early Warning System* sebagai pendukung sistem pertahanan yakni diciptakannya sebuah perangkat atau sitem peringatn dini oleh Jepang yang bernama J-Alert. J-Alert ini merupakan perangkat sebagai sebuah implementasi dari konsep *Early Warning Defense System*. Perangkat ini dicanangkan oleh Pemerintah Jepang guna melindungi masyarakatnya dari kemungkinan bahaya yang ditimbulkan oleh peluncuran rudal yang melewati konstitusi Jepang dengan cara memberikan instruksi kepada khalayak umum. Kehadiran perangkat ini disambut baik oleh masyarakat dan juga telah terbukti keoptimalan kerjanya saat Korea Melakukan peluncuran rudalnya. Sistem J-Alert dalam waktu kurang lebih 20 detik dari waltu peluncuran rudal oleh Korea Utara secara otomatis memberikan informasi dan instruksi kepada masyarakat Jepang.

Daftar Pustaka

- BBC. (2017, August 3). *Korea Utara" Peluncuran rudal di atas Jepang cuma langkan pertama operasi militer*. Retrieved from BBC News:
<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41092154>
- Centre of Public. (2016, March 30). *J-Alert: Disaster warning technology in Japan*. Retrieved from Centre for Public Impact:
<https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/disaster-technology-japan/>
- Choe, S. (2011, December). *Kim Jong Un named Leader of North Koean Army*. Retrieved from New York Times:
<https://www.nytimes.com/2011/12/30/world/asia/north-korea-declares-kim-jong-un-as-supreme-leader.html>
- Christiastuti, N. (2018, April 21). *Jepang tidak Puas pada janji Korut Tangguhkan Uji Coba Nuklir*. Retrieved from news detik: <https://news.detik.com/internasional/d-3983085/jepang-tak-puas-pada-janji-korut-tangguhkan-uji-coba-nuklir>
- Cnn Indonesia. (2016, February 07). *Walau diancam, Korut Tetap Luncurkan Roket Jarak Jauh*. Retrieved from Cnn Indonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160207085815-113-109378/walau-diancam-korut-tetap-luncurkan-roket-jarak-jauh> diakses pada 14 feb 2019
- Congressional Research Service. (2017). *Japan-U.S. Relations: Issues for Congress. Issues for Congress* (p. 20). United States: Congressional Research Service.
- Dueck, C. (2004). *Ideas and Alternative in American Grand Strategy 2000-2004, Riview of International Studies* (Vol. 30). Cambridge: Cambridge University Press.
- Hasan, R. A. (2017, may). *Hanya 10 Menit untuk Lari, Warga Jepang dihantui Rudal Korut*. Retrieved from Liputan6:
<https://www.liputan6.com/global/read/2937646/hanya-10-menit-untuk-lari-warga-jepang-dihantui-rudal-korut>
- Jones, W. S. (1992). *Logika Hubungan Internasional 1: "Persepsi Nasional"*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Juwana, H. (1993). *In Japan's Defense Conception and It's Implication for Southeast Asia*. Indonesia: The Indonesian Quarterly.

- Kompas.com. (2017, September 3). *Jepang Pastikan Guncangan Kuat di Korut akibat Uji Coba Nuklir*. Retrieved from Kompas:
<https://internasional.kompas.com/read/2017/09/03/12504541/jepang-pastikan-guncangan-kuat-di-korut-akibat-uji-coba-nuklir>
- Ministry of Defense. (2014). *Japan-U.S. Defense Ministerial Meeting*. Retrieved from Ministry of Defense of Japan: <http://www.mod.go.jp/e/jdf/no46/leaders02.html>
- Ministry of Internal Affairs and Communications. (2014). Disaster Information Sharing Through J-Alert. *The Bppklet of Best Practices of Resilient ICT System in Japan*, 26.
- Priyono, E. M. (2011). *Peran & Kriteria Rudal Darat-Udara Dalam SISHANUDNAS*. Bandung: Universitas Nurtanio Bandung.
- Ramadhan, M. R. (2011, Maret 30). *Human Security*. Retrieved from SCRIBD:
<http://id.scribd.com/doc/51882487/Human-Security>
- Reza, B. (2017, October 19). *Korea Utara Te,bakan Rudal, Masyarakat Jepang Khawatir*. Retrieved from Tempo.co:
<https://dunia.tempo.co/read/1026178/korea-utara-tembakkan-rudal-masyarakat-jepang-khawatir>
<https://dunia.tempo.co/read/1026178/korea-utara-tembakkan-rudal-masyarakat-jepang-khawatir>
- Secreatariat Cabinet. (2012, April 2). *Summary Information*. Retrieved from Civil Protection Portal Site: http://www.kokuminhogo.go.jp/en/pc-index_e.html
- Tempo. (2018, October 3). *Korea Utara tembakkan Rudal, Masyarakat Jepang Khawatir*. Retrieved from Tempo.co:
<https://dunia.tempo.co/read/1132544/korea-selatan-sebut-korea-utara-masih-miliki-60-senjata-nuklir>